

**PEMIKIRAN BENAZIR BHUTTO
TENTANG RELASI ISLAM DAN NEGARA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**LUKMAN SANTOSO
05370034**

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. Dr. AHMAD YANI ANSHORI**
- 2. Drs. RIZAL QOSIM, M. Si.**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Pakistan merupakan sebuah negara Islam yang merdeka pada 14 Agustus 1947. Sejak kemerdekaannya, terdapat perbedaan pendapat dikalangan kaum muslim Pakistan yang terdiri dari kelompok sekular, moderat dan Islamis tentang bagaimana seharusnya penerapan relasi Islam dan negara di Pakistan, sehingga menimbulkan kemelut politik yang berkepanjangan ketika Pakistan mencari identitasnya selaras dengan kehendak rakyat dan para pemimpinnya. Kemelut politik Pakistan yang tak berkesudahan inilah yang kemudian menggugah politisi dan pemikir perempuan Pakistan, yakni Benazir Bhutto untuk berkiprak di dunia politik. Latar belakang keluarga yang sejak kecil melibatkannya dalam kehidupan politik, kemudian dididik menjadi muslim demokratis dan toleran, serta belajar dalam pendidikan ala Barat, menjadi sosialisasi politik baginya untuk kemudian menerapkan pemikiran yang unik, yang mendasarkan pertimbangannya pada aspek substantif pemaknaan Islam di Pakistan sebagai negara Islam.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah bagaimana pemikiran Benazir Bhutto tentang relasi Islam dan Negara?, Bagaimana kontribusi pemikiran Benazir Bhutto tentang relasi Islam dan Negara bagi Pakistan? Serta Bagaimana relevansi pemikiran Benazir Bhutto tentang relasi Islam dan Negara bagi Indonesia?. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana pola relasi Islam dan Negara menurut pemikiran Benazir Bhutto, menjelaskan bagaimana kontribusi pemikiran Benazir Bhutto bagi Pakistan serta menjelaskan relevansi pemikiran Benazir Bhutto tentang relasi Islam dan Negara bagi Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Yakni penelitian yang merupakan data dari buku, majalah, atau karya ilmiah yang relevan yang terkait dengan penelitian ini dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mengkaji pemikiran tokoh. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional dengan melalui proses analisis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang lazim digunakan dalam studi awal atau studi yang bersifat eksploratif. Analisis dilakukan dengan menggunakan penalaran deduktif dan induktif untuk mendapatkan jawaban dari persoalan yang diteliti. Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan historis-sosiologis. Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pemikiran tokoh tersebut lahir. Sedangkan pendekatan sosiologis bertujuan untuk menemukan relevansi pemikiran tokoh tersebut dengan realitas yang terjadi di Pakistan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui, bahwa Benazir dengan pemikirannya yang cenderung substantivistik dan tergolong bertentangan dengan mayoritas muslim Pakistan (tradisionalis dan fundamentalis) ini, ingin mengatakan gagasannya selaras dengan eksistensi, artikulasi, dan manifestasi nilai-nilai Islam yang instrinsik dalam iklim politik kebangsaan lebih penting untuk dilakukan, sekaligus amat kondusif bagi upaya pengembangan nilai Islam dalam sosok kulturalisasi masyarakat dan dunia Islam modern. Sedangkan dari pemahaman yang lebih umum, gagasan Benazir ini adalah counter wacana terhadap pemikiran yang

mengidealkan bahwa Islam harus menjadi dasar negara. Pemikiran Benazir ini selaras dengan paradigma Islam yang melihat bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara atau sistem praktik yang harus diselenggarakan oleh umatnya, ataupun istilah-istilah teknis politik lainnya, kecuali nilai-nilai dan prinsip-prinsip etis tentang demokrasi, keadilan, egalitarianisme, persaudaraan, dan kebebasan yang justru bersifat universal, yang akhirnya sepanjang suatu negara tetap berpegang dan menyelenggarakan prinsip-prinsip universal itu, maka baik sistem maupun mekanisme yang dijalankan adalah benar menurut Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Nota Dinas Skripsi Saudara
Lukman Santoso
Lamp : 1 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lukman Santoso
NIM : 05370034
Judul : **Pemikiran Politik Benazir Bhutto Tentang Relasi Islam
Dan Negara Di Pakistan.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Oktober 2009 M
07 Dzulqa'dah 1430 H

Pembimbing I



Dr. Ahmad Yani Anshori
NIP.19731105 199603 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Nota Dinas Skripsi Saudara
Lukman Santoso
Lamp : 1 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lukman Santoso
NIM : 05370034
Judul : **Pemikiran Politik Benazir Bhutto Tentang Relasi Islam
Dan Negara Di Pakistan.**

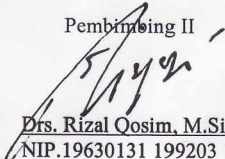
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syaria'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Oktober 2009 M
07 Dzulqa'dah 1430 H

Pembimbing II


Drs. Rizal Qosim, M.Si.
NIP.19630131 199203 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.009/98/2009

Skripsi Berjudul: **PEMIKIRAN BENAZIR BHUTTO TENTANG RELASI ISLAM DAN NEGARA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUKMAN SANTOSO

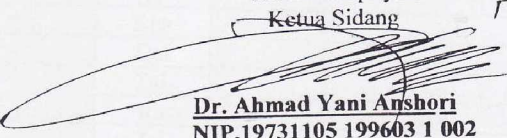
NIM : 05370034

Pada : 04 November 2009

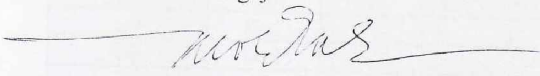
Nilai Munaqasyah: A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

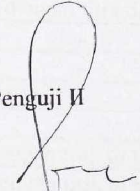
Tim Munaqasyah
Ketua Sidang


Dr. Ahmad Yani Anshori
NIP.19731105 199603 1 002

Penguji I


H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP.19700816 199703 1 002

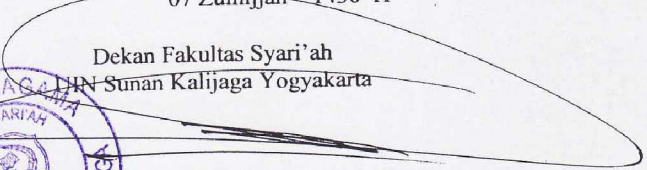
Penguji II


Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP.19750517200501 1 004

Yogyakarta, 24 November 2009 M
07 Zulhijjah 1430 H

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

*“Setiap kebaikan manusia diukur dari sejauh mana
bermanfaat terhadap orang lain.”*

*“Nafkahkanlah hatimu untuk akhiratmu, niscaya Tuhan
melimpahkan kemulyaan untuk duniamu.”*

(Lukman Az)

PERSEMBAHAN

*Karya ini penyusun persembahkan kepada:
Ayahanda dan Ibunda tercinta,
Saudara-saudaraku tersayang,
Scriptoriumku PPM Hasyim Asy'ari Yogyakarta,
Almamaterku Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dan, setiap orang yang bercita-cita menjadikan rekonsiliasi Islam dan politik
sebagai alat untuk menebar rahmat Tuhan bagi seluruh semesta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهdy الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan hidayah dan inayah-Nya karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan contoh bagaimana menjadi hamba sekaligus pemimpin di bumi yang patut menjadi panutan hidup dari masa ke masa.

Karya ilmiah ini berjudul “Pemikiran Benazir Bhutto Tentang Relasi Islam dan Negara di Pakistan”, sebuah judul hasil dari dialektika yang panjang serta perenungan yang mendalam. Penyusun sadari sejak awal bahwa mengkaji pemikiran sosok negarawan yang pantang menyerah dalam memperjuangkan nilai Islam dan demokrasi di sebuah negara Islam; Pakistan, membutuhkan kerja keras dan kesabaran.

Pakistan bukanlah sebuah bangsa Islam yang sepi dari hingar-bingar dan gejolak seperti dua belas abad lalu ketika Dinasti Mughal masih berkuasa dan berjaya. Pakistan kini menampilkan dinamika yang berbeda ketika bersingungan dengan Islam, demokratisasi, militerisme, dan ekstrimisme yang sama-sama saling berkelit kelindan.

Namun, setidaknya karya ilmiah ini memberikan sumbangsih pengetahuan bagi publik pembaca. Terlepas dari proses panjang penelitian penyusun, tentunya penyusun patut berterima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu dan mendukung dalam

penulisan hingga selesai dan selama penyusun berada dilingkungan civitas akademika.

Untuk itu, pada kesempatan kali ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah.
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku ketua Jurusan JS (Hukum Pidana dan Tata Negara Islam) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Penasehat Akademik penyusun, yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan yang padat dalam memberikan pengarahan dan bimbingan.
4. Bapak Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan JS, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk mengarahkan dan mengajarkan banyak hal kepada penyusun.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, selaku pembimbing I, dan Bapak Drs. Rizal Qosim, M. Si, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan dan jadwalnya yang padat untuk mengarahkan dan mengajarkan banyak hal kepada penyusun, sampai skripsi ini selesai.
6. Bapak HM. Nur, S.Ag., M.Ag, selaku penguji I, dan Bapak Drs. Subaidi, M.Si, selaku penguji II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan dan jadwalnya yang padat untuk mengoreksi dan mengevaluasi skripsi penyusun, dalam sidang munaqasyah.
7. Ayahanda tercinta, Jumali, yang telah mengajarkan tentang ketekunan dan kesabaran serta banyak hal tentang kehidupan. Ibunda tercinta, Hindun Marfu'ah, yang sedari kecil telah mengajarkan cinta dan kehidupan. Ucapan terima kasih yang tak terhingga karena kasih sayang dan perjuangan keras beliau berdua yang tak kenal lelah untuk mendidik dan membesarkan penyusun. Semoga Allah Yang Maha Kuasa membalas kebaikan beliau melebihi amal tersebut.

8. D'. Muslih Busairi, D'. Imam Mahmudi (alm), D' Novita Lestari, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita diberikan kemudahan jalan oleh Allah SWT.
9. Almaghfurlah K.H Zainal Arifin Thoha, yang telah mengenalkan penyusun terhadap 'semesta dialektika pengetahuan', sekaligus menjadi 'ayah' penyusun di perantauan, budi baikmu sangat sulit aku balas dan tak terkira mulyanya. Ibunda Nyai Maya Veri Oktavia, yang telah mengajarkan makna menjadi santri kepada penyusun, sekaligus menganggap penyusun seperti anak sendiri. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang lebih.
10. Segenap Dosen, Staf Tata Usaha, Karyawan, khususnya di Lingkungan Fakultas Syari'ah atas interaksi yang hangat selama penyusun kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Segenap mahasantri, senoir, alumni, penasehat PPM Hasyim Asy'ari (Kang Dim, Cak Rusdi, Kang Subhan, Om Prof, Gus Fauzi, Kang Madun, Gus Rosyid, Kang Gugun, Gus Muhlish Amrin, Kang Faisol, dan semua gus-gus yang lain; Pak Joni, Pak Hamdi, Pak Kumpul, Pak Ahmad, Mas Arif Fauzi, Mas Saiful Amin, Gus Muhidin M. Dahlan), terima kasih. Juga kepada semua orang yang mengenalkan penyusun pada Tan Malaka dan Ali Syari'ati; dan semua orang yang pernah singgah di '*maqomam mahmudah*' Hasyim Asy'ari untuk memberikan motifasi, ilmu ataupun sekedar berbagi pengalaman.
12. Laboratorium Informasi Hasyim Asy'ari, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Kota dan Daerah Yogyakarta, Perpustakaan St. Kolese Ignatius Kota Baru, Perpustakaan UGM, yang telah memberikan banyak materi berharga sebagai bahan skripsi ini.

13. Rekan-rekan Jinayah Siyasa angkatan 2005; KODAMA Yogyakarta; BEM-J JS; PSKH Fak. Syari'ah UIN; PMII Komisariat Fak. Syari'ah; LeSAN Fak. Syari'ah; Asrama Al-Kapone, Thanks for everything.
14. Ucapan terima kasih terkhusus penyusun sampaikan kepada, teman-teman Yayasan Hasyim Asy'ari Yogyakarta (Budi, Miftah, Sanusi, Ghannoe); Dedy Firmansyah; Teman-teman LPM Advokasia Fak. Syari'ah (Ali, Zunni, Ipech, Riyadl, Hasan, Kru Angkatan 2007, Kru Angkatan 2008, Kru Angkatan 2009), yang menjadi teman diskusi penyusun sekaligus menuai kearifan dari liku-liku informasi dan persoalan kehidupan. Dan satu hal buat mereka, perbedaan itu indah.
15. Dr. Leila Mona Ganiem, sang 'juru bicara' Benazir Bhutto, yang telah memberikan referensi berharga dari negeri Pakistan buat penyusun.
16. Dhurorudin Mashad, atas inspirasi analisisnya, dan berbagai kajian yang sangat membantu.
17. Dan kepada semua pihak yang tidak mungkin disebut satu persatu yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan tersebut.

Demikian yang penyusun bisa sampaikan, dan atas kekurangsempurnaan skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun, sehingga sangat menanti kritik dan saran dari sidang pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 26 Oktober 2009 M
07 Zulqa'dah 1430 H

Penyusun



Lukman Santoso
NIM. 05370034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II POLA RELASI ISLAM DAN NEGARA	
A. Relasi Islam dan Negara	23
B. Relasi Islam dan Negara dalam Pemikiran Politik Islam	31
1. Masa Klasik	31
2. Masa Pertengahan	38
3. Masa Modern	45

BAB III	BIOGRAFI BENAZIR BHUTTO	
A.	Latar Belakang dan Perjalanan Hidup	58
B.	Karier dan karya-Karya Benazir Bhutto	66
C.	Karakteristik Pemikiran Benazir Bhutto	76
D.	Relasi Islam dan Negara Menurut Benazir Bhutto	81
BAB IV	ANALISIS ATAS PEMIKIRAN BENAZIR BHUTTO	
A.	Catatan Atas Pemikiran Benazir Bhutto	86
B.	Kontribusi Pemikiran Benazir Bhutto Bagi Politik Pakistan	98
C.	Relevansi Pemikiran Politik Benazir Bhutto di Indonesia	103
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	109
B.	Saran-Saran	111
	DAFTAR PUSTAKA	113
	LAMPIRAN	118
	TERJEMAHAN	
	BIOGRAFI TOKOH	
	CURRICULUME VITAE	

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987** yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʿ	B	-
ت	Ta ^ʿ	T	-
ث	Sa	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha ^ʿ	H	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	-

ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

Contoh:

كَتَبَ - kataba

ذُكِرَ - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوْلًا - haula

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
اِ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يَ			<i>Kasrah dan ya</i>
يِ			<i>i dengan garis di atas</i>
وُ	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qâla

قِيلَ - qîla

رَمَى - ramâ

يَقُولُ - yaqûlu

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الاطفال - Raudah al-athfal

طلحة - Talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: البير - al-birru

نزل - nazzala

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “لا”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلالُ - al-jalalu
 الشمس - as-syamsu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

 وما محمد الا رسول - wa ma_ Muhammadun illa rasul

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dan politik adalah dua entitas yang sepanjang sejarah umat Islam senantiasa terlibat dalam pergumulan. Puncak dari pergumulan keduanya pertama kali muncul ketika terjadinya gerakan revolusi di Turki yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada perang dunia pertama. Runtuhnya otoritas khilafah di Turki setelah kekalahan Islam atas Inggris membawa penderitaan panjang bagi umat Islam. Keruntuhan tersebut mendapatkan perhatian serius dari seluruh umat Islam, terutama di India yang melatarbelakangi pembentukan gerakan khilafah di tahun 1919.¹

Gerakan ini dari tahun ke tahun semakin masif melancarkan kampanye anti-Inggris yang saat itu sedang menjajah India. Gerakan ini pulalah yang pada akhirnya mengilhami umat Islam India untuk mewujudkan negara sendiri. Negara tersebut kemudian diberi nama Pakistan.² Republik Islam Pakistan,³ merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim-sunni di

¹ Gerakan Anti Inggris yang paling terkenal di India saat itu adalah *All India Khilafat Conference* dengan tokoh utama Muhammad Ali dan Syaikat Ali. Lihat A. Mukti Ali, *Alam Pikiran India dan Pakistan*, cet. Ke-3 (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), hlm. 41-43.

² Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat tahunan Liga Muslim yang diadakan di Lahore pada tahun 1940. Gagasan tersebut pertama kali di usulkan oleh Muhammad Iqbal (1873-1938). Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, cet. ke-9 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 197.

³ Nama Pakistan merupakan sumbangan dari beberapa mahasiswa Muslim India di Cambridge University. Nama Pakistan merupakan reaktualisasi dari Negara baru yang digagas Muhammad Iqbal (1875-1838). Pakistan juga dirumuskan dari nama-nama propinsi yang berpenduduk mayoritas agama Islam di daerah Barat Laut India: Punjab, Afghan, Kashmir, Shind,

wilayah Asia Selatan. Keberadaan Pakistan berkat keberhasilan teori dua bangsa (*Two Teory Nations*) yang dikemukakan oleh Muhammad Ali Jinnah (1876-1949).⁴ Pakistan menduduki peringkat keenam negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Ia juga menduduki peringkat kedua dalam negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia setelah Indonesia.⁵

Pakistan lahir didasari atas aspirasi umat Islam India yang menghendaki Islam sebagai *raison d'être* (tujuan keberadaan). Tetapi sebelum Ali Jinnah sempat mendeterminasikan karakteristik negara ideologis ini, Ia lebih dulu meninggal.⁶ Sehingga masalah tempat dan pengertian tentang Islam belum juga terselesaikan. Selisih pendapat dan benturan pendirian masih terus berlanjut antara kelompok “sekular”, moderat dan kelompok yang ingin melaksanakan “sistem politik, ekonomi dan sosial Islam”.⁷

Salah satu persoalan politik yang juga mengiringi Pakistan di masa

dan Baluchistan. Nama ini juga berarti “negeri yang suci”. Usulan itu juga diungkapkan Choudhury Rahmat Ali, salah satu mahasiswa muslim India di Cambridge University bahwa tanah orang-orang Pakistan adalah orang yang rohaninya suci dan bersih”. Lihat Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 57. Lihat juga Harun Nasution, *Pembaharuan ...*, hlm. 194.

⁴ Umat Islam sebagai agama minoritas di anak-benua India merasa kurang begitu memperoleh ruang gerak untuk membumikan dan mengukuhkan eksistensinya. Realitas itu melahirkan “*Two Nation Theory*”, atau teori dua bangsa yang dirintis oleh Sayyed Ahmad Khan dan direalisasikan Muhammad Ali Jinnah. Teori tersebut juga menegaskan bahwa umat Islam dan Hindu adalah dua bangsa dengan latar belakang budaya, peradaban, adat, literatur, sejarah dan agama yang berbeda. Lihat Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan...*, hlm. 56.

⁵ “Pakistan”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pakistan>, akses tanggal 5 Januari 2009.

⁶ Ditengah kondisi Pakistan sedang berbenah diri untuk mengukuhkan posisinya di kancah politik dunia, pada 11 September 1948 kematian menjemput Ali Jinnah. Liaquat Ali Khan kemudian menggantikan posisi Ali Jinnah, sedangkan Gubernur Jenderal digantikan Khawaza Najimuddin. Lihat Benazir Bhutto, *Rekonsiliasi, Islam, Demokrasi dan Barat*, terj. Annisa Rahmalia (Jakarta: Buana Ilmu Populer), hlm. 183.

⁷ Dalam Undang-undang Dasar Pakistan tahun 1956 nama resmi negara itu adalah “Republik Islam Pakistan”. Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* cet. ke-5 (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 228.

awal berdirinya adalah persoalan batas wilayah. Sehingga secara geografis Pakistan dibagi menjadi dua, yaitu Pakistan Barat dan Timur (sekarang Pakistan Timur telah merdeka menjadi Bangladesh);⁸ kedua wilayah tersebut dipisahkan oleh India sejauh 1200 mil.⁹

Setelah merdeka, dasar konstitusi Pakistan baru dapat dirumuskan pada masa kepemimpinan Khawaza Najimuddin. Dokumen pertama dasar konstitusi tersebut tertuang dalam *Objective Resolution*,¹⁰ yang disampaikan Liaquat Ali Khan dihadapan Majelis Konstituante pada Maret 1949. Garis-garis besar resolusi tersebut menyatakan bahwa “kedaulatan hanyalah milik Tuhan. Tuhan memberikan kekuasaannya kepada kepala Negara Pakistan melalui Rakyat untuk melaksanakan sesuai batas-batas yang ditentukan-Nya.”¹¹

Masih terdapatnya perdebatan dikalangan kaum muslim Pakistan tentang bagaimana seharusnya negara Islam itu, semakin membawa konsekuensi yang rumit ketika Pakistan mulai mencari Identitas Islamnya selaras dengan kehendak rakyat dan para pemimpinnya. Kompromi antara

⁸ Lahirnya Bangladesh sebagai negara merdeka tampaknya telah menjadi saksi gagalannya nasionalisme Muslim di Pakistan. Peristiwa ini juga telah menimbulkan pertanyaan serius mengenai ideologi Islam di Pakistan. Ternyata kesamaan identitas belum mampu menyatukan kedua wilayah ini secara internal, serta menjembatani perbedaan etnik dan linguistik. Jika menelaah peran Islam dalam politik Pakistan selama dua dekade tersebut, Islam tidak memberikan solusi konkrit yang dapat diterima semua elemen dalam pengertian-pengertian khusus suatu negara Islam, terlebih untuk mempertahankan Islam sebagai fokus utama loyalitas.

⁹ Kesulitan politik pun muncul karena kurangnya komunikasi pusat dan daerah, dan belum terbentuknya pemerintahan yang mapan. Pengusiran umat Islam India secara eksodus ke Pakistan merupakan langkah yang diambil pemerintah India untuk menambah beban ekonomi Pakistan yang masih belum stabil. Lihat pula Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 151.

¹⁰ Pendelegasian otoritas yang tercantum dalam resolusi ini selaras dengan demokrasi, kemerdekaan, persamaan, toleransi dan keadilan sosial. Namun, kaum tradisional, meskipun menerima resolusi tersebut tetap menyatakan ketidak puasannya dengan kedudukan minoritas non-Muslim di negara Pakistan. Lihat Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan....*, hlm. 66.

golongan tradisional, fundamentalis dan modernis baru dapat terwujud, yakni dalam bentuk Konstitusi Pertama 1956,¹² dibawah pimpinan perdana menteri Choudhury Muhammad Ali.

Di tahun tersebut, Presiden terpilih dibawah konstitusi 1956 adalah Jenderal Iskandar Mirza, pemimpin yang secara tegas menyatakan bahwa agama dan politik harus dan sudah semestinya dipisahkan.¹³ Setelah Mirza, terdapat tiga corak keislaman yang mempengaruhi perkembangan politik Pakistan. *Pertama*, Modernisme Islam, yang dilancarkan Ayub Khan (1958-1969). *Kedua*, Sosialisme Islam, yang diintrodusir oleh Zulfikar Ali Bhutto (1971-1977). *Ketiga*, penggalakan *Nizamul Islam* (Islamisasi) oleh Zia ul-Haq (1977-1988).¹⁴

Sepeninggal Zia, Pakistan dipimpin Benazir Bhutto. Sosok perempuan yang berupaya menjanjikan modernitas Pakistan yang setelah sekian lama dikuasai rezim militer. Benazir tidak hanya berupaya menghaluskan ketabuan fatwa keagamaan di negaranya yang melarang perempuan menjadi pemimpin,

¹² Konstitusi pertama diumumkan tanggal 29 Februari 1956, lima tahun sesudah meninggalnya tokoh pendiri Pakistan, Liaquat Ali Khan pada tanggal 16 Oktober 1951, latar Belakang mengenai terbunuhnya masih simpang siur, namun beberapa sumber menyebutkan pembunuh tersebut bernama Said Akbar, tapi siapa otak pelaku dibalik pembunuhan itu tidak diketahui. Lihat "Liaquat Ali Khan become Prime Minister 1947-1951" dalam <http://www.storyofpakistan.com/articletext.asp?artid=A134>. akses tanggal 8 Januari 2009.

¹³ Dengan pandangannya itu, Mirza kemudian pada tanggal 7 Oktober 1958 menghapus badan-badan legislatif, membubarkan partai-partai politik, memberlakukan hukum darurat perang, dan menangguhkan konstitusi 1956, bahkan Ia juga mengubah nama Republik Islam Pakistan menjadi Republik Pakistan. Setelah penangguhan itu, masih pada bulan Oktober 1958, Muhammad Ayub Khan, sebagai pelaksana hukum darurat perang segera melakukan kudeta militer terhadap Mirza, karena dianggap bahwa kebijakan Mirza sudah tidak sesuai dengan Identitas Pakistan sebagai Negara Islam dan cenderung diktator. Lihat Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan....*, hlm. 71.

¹⁴ Masa pemerintahan Zia merupakan masa paling suram dalam sejarah demokrasi Pakistan. Partai-partai politik dibekukan, media massa berada dalam pengawasan ketat rezim militer dan demokrasi dianggap sebagai suatu paham yang bertentangan dengan Islam.

Ia juga berani untuk menggeluti politik yang penuh dengan intrik dan konflik. Benazir menjanjikan demokratisasi sipil untuk kembali berkuasa di Pakistan. Banyak pihak yang optimistis pada kepemimpinan Benazir ini, karena memang memiliki faktor dinasti politik yang berpengaruh, sekaligus kecerdasan politik yang kuat. Variabel inilah yang memunculkan harapan besar dari rakyat Pakistan pada figur Benazir untuk menerapkan pola relasi Islam dan Negara di Pakistan.

Terjadinya tragedi politik yang berkepanjangan di Pakistan, menjadikan ruang politik Pakistan sudah sangat rumit untuk diuraikan dalam waktu singkat. Pakistan memang membutuhkan jalan baru bagi proses pendewasaan berpolitik. Peristiwa pembunuhan atas Benazir Bhutto pada 27 Desember 2007 ketika Ia akan kembali ke panggung politik, menjadi episode paling aktual dari kekisruhan Politik di Pakistan. Dalam konteks inilah mengapa penyusun memfokuskan tema tersebut pada penelitian ini.

B. Pokok Masalah

Dalam penyusunan karya ilmiah, pokok masalah menjadi penting untuk memberikan arahan yang tepat agar sebuah karya ilmiah tidak keluar dari alur permasalahan inti. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang menjadi objek penelitian ini adalah, bagaimana pemikiran Benazir Bhutto Tentang relasi Islam dan Negara sehingga memberi warna lain diranah politik Pakistan dan dunia Islam. Secara sederhana pokok masalah tersebut dapat dirumuskan dalam pertanyaan berikut :

1. Bagaimana pemikiran Benazir Bhutto tentang relasi Islam dan Negara?
2. Bagaimana kontribusi pemikiran Benazir Bhutto tentang relasi Islam dan Negara bagi Pakistan ?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Benazir Bhutto tentang relasi Islam dan Negara bagi Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari pokok masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

- a. Tujuan
 - a. Menjelaskan bagaimana pola relasi Islam dan Negara menurut pemikiran Benazir Bhutto.
 - b. Menjelaskan bagaimana kontribusi pemikiran Benazir Bhutto bagi Pakistan.
 - c. Menjelaskan relevansi pemikiran Benazir Bhutto tentang relasi Islam dan Negara bagi Indonesia.
- b. Kegunaan
 - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kelengkapan khazanah keilmuan politik Islam, peneliti, khususnya akademisi yang memiliki konsentrasi pada disiplin ilmu politik Islam Kontemporer.
 - b. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi tambahan pengetahuan publik tentang perkembangan politik kontemporer di Pakistan, menjadi bahan pembelajaran bagi elite politik

muslim Indonesia yang berkompetisi di ranah politik nasional, sekaligus tambahan referensi bagi para pemangku kebijakan bidang politik luar negeri.

D. Telaah Pustaka

Pergulatan Politik Pakistan memang masih menjadi persoalan yang berkelanjutan hingga saat ini. Khususnya identitas Islam yang menjadi landasan berbangsa dan bernegara Pakistan. Berbagai kajian tentang Pakistan sudah banyak dilakukan, terutama pada aspek historis Pakistan, entah berkaitan pada proses penataan paska kemerdekaan, seperti yang pernah di tulis Richard Symonds,¹⁵ dan Hamzah Amal,¹⁶ tokoh-tokoh yang melatarbelakangi kemerdekaan serta gagasan yang mereka tawarkan, seperti yang di tulis Mukti Ali,¹⁷ atau iklim keislaman yang terjadi pada setiap pemimpin yang berkuasa.¹⁸

Dari sekian karya tulis itu, belum ada yang secara spesifik mengkaji pemikiran politik Benazir Bhutto tentang relasi Islam dan Negara di Pakistan.

¹⁵ Richard Symonds, *Pembinaan Pakistan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1951).

¹⁶ Hamzah Amal, *Pakistan Sebuah Negara Islam Muda* (Jakarta: Penerbit Jambatan, 1952).

¹⁷ Mukti Ali, *Alam Pikiran Modern di India dan Pakistan* (Bandung: Penerbit Mizan, 1995).

¹⁸ Seperti penelitian mahasiswa antara tahun 1998-2008 yang dilakukan Nur Saidah, *Proses Berdirinya Negara Islam Pakistan (1937-1947)* (Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998); Ana Wafiyah, *Peranan Jama'at-I Islami dalam Mewujudkan Negara Islam Pakistan (1948-1973)* (Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001); Siti Marfu'ah, *Islamisasi Pakistan pada Masa Zia ul-Haq (1977-1988)* (Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001); Astuti Kusumawati, *Pakistan pada Masa Pemerintahan Zulfikar Ali Bhutto (1971-1977)* (Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002); Nur Asiah, *Kebijakan Politik Ayub Khan di Pakistan (1958-1969)* (Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006); Adiguna, *Pemikiran Politik Sayid Abul A'la Maududi dan Kontribusinya Bagi Pakistan (1941-1979)* (Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

Karya tulis yang saat ini ada baru dalam bentuk biografi singkat Benazir Bhutto, semisal yang ditulis Katherine M. Doherty dan Craig A. Doherty,¹⁹ dalam bukunya yang berjudul *Benazir Bhutto*. Buku ini terbit dalam edisi terbatas dalam bentuk pdf. Buku ini menceritakan perjalanan pendidikan Benazir sejak kecil hingga terjun ke dunia politik dan menjadi perdana menteri di tahun 1988. Kupasan dalam buku ini lebih difokuskan pada kebijakan-kebijakan Benazir di periode awal pemerintahannya hingga tahun 1990, ketika Benazir di berhentikan dari jabatannya. Kajian yang hampir serupa dilakukan Rafiq Zakaria,²⁰ dalam bukunya *The Trial of Benazir* yang terbit di Pakistan dan India dalam edisi terbatas. Buku ini mengupas karier politik Benazir hingga tahun 1989. Dalam buku ini, pembahasan lebih ditekankan pada Benazir sebagai sosok perempuan yang terjun ke panggung politik, serta pandangan Benazir terhadap status perempuan dalam Islam.

Dhurorudin Mashad,²¹ dalam bukunya yang berjudul *Benazir Bhutto, Profil Politisi Wanita di Dunia Islam*, mengulas perjalanan hidup Benazir sejak sekolah hingga berkiprah di dunia politik. Pembahasan dalam buku ini lebih ditekankan pada kiprah politik Benazir hingga menjadi perdana menteri selama dua periode. Dalam buku ini Mashad juga mengupas intrik politik yang mengiringi karier Benazir selama dua periode itu, dan latar belakang persoalan mengapa pemerintahannya tidak bertahan lama.

¹⁹ Doherty Katherine M, dan Doherty, Craig A, *Benazir Bhutto* (pdf-search-engine, 1990).

²⁰ Rafiq Zakaria, *The Trial of Benazir* (Bombay: Popular Prakashan, 1989).

²¹ Dhurorudin Mashad, *Benazir Bhutto; Profil Politisi Wanita di Dunia Islam* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996).

Terakhir, buku dengan judul *Tragedi Benazir Bhutto* yang ditulis Zaenal Ali.²² Buku yang terbit pada 2008 ini secara garis besar mengkaji tentang perjalanan hidup Benazir Bhutto secara singkat sejak masa sekolahnya di Amerika dan Inggris, kiprahnya di dunia politik, hingga intrik politik yang menyebabkannya meninggal secara tragis.

Kajian-kajian dalam tulisan-tulisan diatas lebih banyak difokuskan pada profil Benazir Bhutto secara umum, sehingga pemikiran politik Benazir Bhutto, serta perkembangan Pakistan kontemporer tidak dikupas. Disamping itu, kajian yang ada hanya menitikberatkan pada karier politik Benazir Bhutto. Oleh karena itu, melalui karya tulis ini penyusun mencoba menghadirkan pemikiran politik Benazir Bhutto dalam memandang relasi Islam dan negara ditengah arus demokratisasi dan gejolak fundamentalisme di Pakistan.

E. Kerangka Teoritik

Bagi mayoritas umat Islam, isu utama dewasa ini adalah hubungan Islam dengan konsep kenegaraan dan tatanan dunia Internasional. Menurut mereka, implementasi keadilan, termasuk aturan-aturan syari'ah yang spesifik sebagai program yang lebih penting. Meski selama ini prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan pemerintahan berdasarkan hukum didukung oleh mayoritas besar pemikir Islam, baik fundamentalis maupun modernis; namun hanya dalam pengertian yang sangat umum. Karena ranah pemikiran politik Islam klasik dan abad pertengahan tidak pernah mempersoalkan kedudukan

²² Zaenal Ali, *Tragedi Benazir Bhutto* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2008).

agama dalam relasinya dengan kenegaraan, apakah terintegrasi ataukah terpisah, karena dalam kenyataannya sistem kekhalifahan mengintegrasikan agama dan negara. Sedangkan apa yang sebenarnya konsep negara yang mereka maksudkan, dan bagaimana cara implementasi yang mereka inginkan, kerap kali tidak dijelaskan. Inilah yang kemudian menjadi masalah utama dalam perkembangan politik Islam modern.²³

Namun, dibalik penampilan umum ini terdapat fakta yang sederhana tetapi mendasar, yakni bahwa muslim sebagai umat mempunyai titik tolak yang berbeda dengan Barat. Sehingga Barat memandang Islam sebagai suatu ancaman terhadap demokrasi dan nilai-nilai modern yang beradab. Asumsi semacam ini sebenarnya didasarkan pada dua alasan.²⁴ *Pertama*, masalah konflik kekuasaan. Dewasa ini negara-negara Islam, secara politik dikuasai elite politik sekuler, sehingga mereka mendapat tantangan yang semakin meningkat dari gerakan Islam. Dalam beberapa kasus, gerakan Islam berhasil mengambil alih kekuasaan, namun dalam kasus lain justru bisa berbagi dengan elite sekuler.

Kedua, adalah konflik peradaban. Diakui atau tidak, baik dari segi kultur, politik, maupun ekonomi, Barat saat ini mendominasi dunia. Sedangkan peradaban lain dipandang sebagai marjinal. Kebangkitan Islam kemudian dipandang sebagai ancaman terhadap kemapanan peradaban Barat,

²³ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Nabi hingga Masa Kini*, terj. Abdullah Ali (Jakarta: Penerbit Serambi, 2006), hlm. 610.

²⁴ Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah; Ketidakbijakan AS dan Israel Atas Negara-negara Muslim* (Bandung: Penerbit Mizan, 2007), hlm. 14.

terutama sesudah runtuhnya komunisme. Dalam situasi seperti itu, kekuatan-kekuatan Islam sekuler di negara-negara Islam yang ingin mempertahankan eksistensinya kemudian menjalin kepentingan dengan pihak Barat dalam hal menentang validitas oposisi gerakan Islam.

Untuk memahami kondisi itu, di dalam Islam terdapat beberapa jenis pola hubungan antara agama (Islam) dan negara sebagai landasan kajian analisis. *Pertama*, hubungan yang cenderung didasarkan atas “rivalitas” dan “antagonistik” diantara keduanya, dimana masing-masing berupaya untuk saling “menghancurkan”. Misalnya Turki pada masa tumbangnya imperium Utsmani, 1924, menggambarkan jenis hubungan demikian. Begitupun yang terjadi pada dekade 1980-an, dimana negara cenderung “menafikan” peran agama (Islam) atau setidaknya menjadikan agama (Islam) sebagai “terpinggirkan”, sehingga representasi hubungan antara agama dan negara cenderung bersifat “antagonistik” dan didasarkan atas *rivalitas*. *Kedua*, hubungan yang saling mendukung antara agama dan negara. Abdurrahman Wahid menyebutnya sebagai hubungan *simbiotik*.²⁵ Sedangkan Eka Dharmaputra, menyebutnya sebagai hubungan *kolutif*.²⁶

Hakikat negara seperti yang dikemukakan oleh kelompok “filsuf” *Ikhwan Al-Safa* (Persaudaraan Suci), yang mengandaikan terkandung di dalamnya sejumlah prinsip dasar bagi masyarakat yang mencakup Kebebasan,

²⁵ Ahmad A. Sofyan dan M. Roychan Madjid, *Gagasan Cak Nur*, hlm. 13. merujuk artikel yang ditulis Abdurrahman Wahid, “*Relasi Kuasa dan Agama: Perspektif Historis dan Sosiologis*”, *SANTRI*, No. 04/II September, 1996.

²⁶ *Ibid.*

hak dan kewajiban, keadilan, hukum, dan kedaulatan.²⁷ Pandangan Ikhwan tentang kedaulatan sangat terkait erat dengan pandangan mereka tentang eksistensi manusia, dimana manusia merupakan wakil Tuhan di muka bumi. Di satu pihak, wakil ini mengandung arti delegasi kekuasaan Tuhan pada manusia, yang memberkati manusia sebagai penerima kekuasaan dan kebebasan penuh. Tapi di pihak lain wakil ini mengandung arti bahwa manusia bergantung pada Tuhan yang karena-Nya manusia bertindak.²⁸

Sejarah pemikiran Islam menampakkan eksistensi dan diversifikasi perkembangan arus utama orientasi politik yang dalam penelitian ini digunakan sebagai kategori analitik, walaupun ia tidak bisa sepenuhnya menunjukkan perbedaan absolut antara ide-ide dan orientasi-orientasi politik. Setidaknya ada tiga mainstream diantara pemikir politik Islam.²⁹ Ketiga arus utama tersebut adalah "Arus Formalistik", "Arus Substantivistik", dan "Arus Fundamentalis".³⁰

²⁷ M. Din Syamsudin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 111.

²⁸ *Ibid.* Dalam dilema ini, kelompok Ikhwan memberikan suatu solusi yang menarik; "Hukum Tuhan" dan akal sangat terkait erat dan ternyata tak bisa dipisahkan.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 151.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 151-160. Din Syamsudin mengatakan lebih lanjut; Istilah yang *pertama* dimaksudkan untuk mengacu pada bentuk pemikiran mereka yang mempertahankan pelaksanaan yang ketat dari bentuk-bentuk Islam yang formal. Dalam konteks politik ia menunjukkan orientasi yang cenderung mempertahankan bentuk-bentuk pra-konsepsi politik Islam, misalnya pentingnya partai politik yang formal (menggunakan nama Islam), ungkapan, idiom-idiom, dan simbol-simbol politik Islam, dan terutama landasan organisasi secara konstitusional Islam, atau lebih tegasnya menghendaki Negara Islam. *Yang kedua*, "substantivistik" lebih menekankan tuntutan manivestasi substansial nilai-nilai Islam dalam aktifitas politik, bukan sekedar manifestasinya yang formal, baik dalam ide-ide maupun kelembagaannya. Yang terpenting dalam arus ini adalah eksistensi intrinsik ajaran-ajaran Islam dalam arena politik. Dan yang *ketiga*, Arus "fundamentalis" menganggap bahwa kedua mainstream sebelumnya telah gagal menunjukkan Islam sebagai keseimbangan-tandingan dalam merespon sistem politik di dunia. Mainstream ini cenderung mengangkat kembali sendi-sendi Islam ke dalam realitas politik sekarang. Mereka memandang

Ketiga arus utama politik ini sampai kini masih eksis dalam politik Islam. Semuanya merupakan bagian dari berbagai nuansa Islam, dan masing-masing berhak untuk ambil bagian dalam ujicoba penentuan persoalan Islam, seperti juga dalam mendemonstrasikan bagian mana dari semuanya itu yang lebih elegan atau visible—meminjam bahasanya Din Syamsuddin—di masa depan dan viable dalam upaya memecahkan problem hubungan antara Islam dan Negara dalam konteks budaya dan politik di mana konsep tersebut diterapkan.

Secara garis besar para sosiolog teoretis politik Islam merumuskan teori-teori tentang hubungan agama dan negara dan membedakannya menjadi tiga paradigma; yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik.³¹

Pertama, Paradigma Integralistik, agama dan negara menyatu (*integrated*), negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus, politik atau negara ada dalam wilayah agama. Itu artinya kepala negara memegang kekuasaan agama dan politik. Pendukung paradigma ini meyakini bahwa kedaulatan ada di “tangan Tuhan”, oleh karenanya pemerintahannya diselenggarakan atas dasar “kedaulatan Illahi” (*divine sovereignty*).³² Dengan begitu penerapan dan pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum positif

revolusi sebagai pembenaran atas optimisme masa depan. Banyak dari kelompok-kelompok ini ditransformasikan ke dalam sempalan, yang lewat sikap reasioner politik, menantang penguasa, dan beberapa diantaranya juga menantang kemapanan Islam dengan menawarkan semacam alternatif.

³¹ Marzuki Wahid dan Rumaidi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 23.

³² *Ibid*, hlm. 24.

negara dalam perspektif paradigma integralistik adalah hal yang tidak mustahil untuk dilaksanakan. Dari paradigma ini kemudian melahirkan paham negara-agama, yang dalam kehidupan bernegaranya diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip keagamaan, sehingga melahirkan konsep *Islam din wa dawlah* (Islam agama sekaligus negara).³³ Karena agama dan negara menyatu maka yang terjadi masyarakat sulit membedakan mana aturan negara dan mana aturan agama, karena itu rakyat yang menaati segala ketentuan dan peraturan negara dalam paradigma ini dianggap taat kepada agama, sebaliknya tidak menaati atau melawan negara berarti melawan agama yang berarti juga melawan Tuhan. Karena rakyat tidak dapat melakukan kontrol terhadap penguasa yang selalu berlindung dibalik agama maka otoritarianisme dan kesewenang-wenangan oleh penguasa tentu saja sangat potensial terjadi dalam negara dengan model seperti ini.³⁴ Karena sifatnya yang demikian, negara agama sering dianggap oleh para penulis Barat—sejauh dikaitkan dengan Islam—tidak *compatible* dengan demokrasi. Demokrasi yang berangkat dari paham antroposentris meniscayakan manusia menjadi pusat segala sesuatu, termasuk pusat kedaulatan, sehingga kepala negara harus tunduk kepada kehendak dan kontrol rakyat. Sedangkan negara agama yang berangkat dari paham teosentris menjadikan Tuhan sebagai pusat segala sesuatu. Kepala negara merupakan “penjelmaan” dari Tuhan yang meniscayakan ketundukan

³³ *Ibid.*, hlm. 25.

³⁴ *Ibid.*

mutlak tanpa reserve. Atas nama “Tuhan” penguasa bisa berbuat apa saja dan menabukan perlawanan rakyat.

Kedua, Paradigma Simbiotik, dalam paradigma ini agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang, sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual.³⁵ Untuk meneruskan misi kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia dibutuhkan sebuah instrumen atau alat yang bisa digunakan dan instrumen tersebut adalah kekuasaan, dengan kata lain, kepemimpinan negara. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktifitas yang berbeda, namun mempunyai hubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.³⁶ Ibnu Taimiyyah dalam kerangka hubungan simbiotik ini juga berkesimpulan tanpa kekuasaan negara, agama tidak bisa berdiri tegak, oleh karenanya agama berkewajiban untuk mengatur urusan manusia termasuk adanya kekuasaan yang mengatur urusan masyarakat. Ia pun menganggap bahwa penegakan negara merupakan tugas suci yang dituntut oleh agama sebagai salah satu perangkat untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Didalam konsep ini hukum Islam menduduki posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Demikian juga negara mempunyai peranan yang besar untuk

³⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 26-27.

menegakkan hukum Islam dalam porsinya yang benar. Dengan demikian dalam paradigma simbiotik ini masih tampak adanya kehendak “mengistimewakan” penganut agama mayoritas untuk memberlakukan hukum-hukum agamanya di bawah legitimasi negara. Atau paling tidak karena sifatnya yang simbiotik tersebut, hukum-hukum agama masih mempunyai peluang untuk mewarnai hukum-hukum negara, bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dijadikan hukum negara. Hal itu bisa saja terjadi karena sifat simbiotik antara agama dan negara mempunyai kualitas yang berbeda antara kondisi suatu daerah tertentu dengan daerah yang lainnya.³⁷

Ketiga, Paradigma Sekularistik, paradigma ini memisahkan agama atas negara dan memisahkan negara dari agama. Paradigma ini secara tegas menolak kedua paradigma sebelumnya. Dalam konteks Islam, paradigma ini menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam pada bentuk negara tertentu dari negara.³⁸ Dengan demikian menurut paradigma ini, hukum Islam tidak dapat begitu saja diterapkan dan diberlakukan dalam suatu wilayah politik tertentu. Di samping itu hukum Islam tidak dapat dijadikan hukum positif, kecuali telah diterima sebagai hukum nasionalnya.³⁹ Dalam konsep ini, keberadaan negara tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hasil kontrak sosial dari mkasyarakat manusia

³⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 28.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 28-30.

yang bersifat sekular, akan tetapi lebih dari itu, negara dipandang sebagai jasad atau badan yang niscaya dari idealisme ketuhanan, sedangkan agama adalah substansi untuk menegakkan cita keadilan semesta.⁴⁰

Persingungan antara tiga kelompok ini, kemudian berkembang berabad-abad dalam konteks yang semakin mengglobal. Dalam Islam, Al-Qur'an mengakui manusia (*insan*), tanpa memandang keyakinan dan pendirian politiknya, merupakan legitimasi teologis yang demokratis. Tetapi Al-Quran tidak memiliki padanan kata untuk warga negara (*citizen*), demokrasi (*democracy*), dan istilah lain dalam sistem demokrasi Barat.⁴¹ Itulah sebabnya mengapa sebagian kaum muslim modern menciptakan istilah baru untuk konsep-konsep kenegaraan kontemporer tersebut. Ditambah lagi belum adanya kesepakatan dikalangan para pemikir dan tokoh Islam tentang hubungan antara Islam dan demokrasi, dan membiarkan umat menafsirkan sendiri sesuai konteks bangsa dan kelompok.

Pola pembangunan bangsa-bangsa modern sepanjang politik dunia Islam, seperti ditulis John L. Esposito,⁴² memang memperlihatkan tiga kecenderungan yang serupa atau orientasi yang umumnya ada pada wilayah-wilayah muslim tersebut; pemisahan antara agama dan negara (negara sekuler), Islam memiliki dasar etika kenegaraan (negara berasaskan Islam),

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 30. Marzuki Wahid mengutip Abdurrahman Wahid, "*Kasus Penafsiran Ulang yang Tuntas*", Kata Pengantar dalam Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. xiv – xvi.

⁴¹ Riza Sihbudi, *Menyandera...*, hlm. 21.

⁴² John L. Esposito, *Islam dan Politik*, terj. H.H. Joesoef Soe'ayb (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 9.

dan Islam dan negara adalah integral (negara muslim). Turki sebagai sisa imperium khilafah justru lebih memilih identitas sekuler. Pakistan sendiri justru mengumumkan ciri Islam bagi negaranya dan mengutamakan pelaksanaan hukum Islam. Meskipun, menggunakan konsep pembangunan bernegara dari Barat untuk urusan politik, sosial dan hukum. Namun, perlu juga diperhatikan bahwa secara teoritis, sejarah yang tengah berjalan di Pakistan saat ini patut dianggap sebagai ranah dialektika antara gejala-gejala yang terjadi.

Dari teori-teori yang telah dikemukakan, nantinya diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyusun, dalam proses penyelesaian skripsi ini. Mengingat karena pembahasan skripsi yang penyusun lakukan mengenai relasi "Islam dan Negara" adalah mempunyai relevansi yang sangat mendasar terhadap teori-teori yang telah dikemukakan di atas.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan pemikiran Benazir Bhutto sebagai pemimpin Pakistan tentang relasi islam dan negara. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk mendapatkan jawaban dari persoalan di atas, berikut beberapa aspek metodologis yang penyusun gunakan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari

buku-buku, majalah, dokumen, catatan, atau karya-karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional, dengan melalui proses analisis.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang lazim digunakan dalam studi awal atau studi yang bersifat eksploratif. Penelitian ini juga merupakan investigasi independen yang bertujuan untuk menggambarkan sistem sosial, hubungan-hubungan, atau peristiwa-peristiwa sosial, memberikan informasi awal tentang *issue* yang ditanyakan dalam penelitian sebagai penjelasan yang mendukung dalam penelitian tersebut.⁴³

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dengan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.⁴⁴

3. Pendekatan Penelitian

⁴³ Satirios Sarantakos, *Social Research* (Melbourne: Mac Millan Education Australia Pty Ltd, 1993), hlm. 7.

⁴⁴ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm.26.

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan historis-sosiologis. Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pemikiran tokoh tersebut lahir. Sedangkan pendekatan sosiologis bertujuan untuk menemukan relevansi pemikiran tokoh tersebut dengan realitas yang terjadi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan buku-buku, literatur, serta karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian; *kedua*, klarifikasi data, yaitu usaha untuk memilah data agar memudahkan dalam memahami data; *ketiga* intepretasi data. Data yang telah diklarifikasi kemudian diintepretasikan sesuai kebutuhan penyusun. Data dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

Sumber primer (utama), merupakan karya-karya tokoh yang diteliti, yaitu: mengkaji sumber data berupa buku yang berjudul *Islam, Demokrasi dan Barat* karya Benazir Bhutto, yang dialihbahasakan oleh Annisa Rahmalia, merupakan buku seputar garis besar pemikirannya. Buku *Benazir Bhutto; Profil Politisi Wanita di Dunia Islam* karya Dhurorudin Mashad yang mengupas tuntas seputar karier politik Benazir Bhutto di Pakistan. Serta buku *Tragedi Benazir Bhutto* karya Zainal Ali, yang merupakan buku yang menggambarkan perjalanan singkat hidupnya.

Sedangkan *sumber sekunder* (penunjang), dalam penelitian ini berasal dari berbagai buku, dokumen, dan karya ilmiah yang terkait dengan bahasan

pemikiran tokoh yang diteliti, serta tulisan lain yang membahas tentang Pakistan. Kemudian disempurnakan dengan *sumber tersier*, yang meliputi artikel, catatan, ataupun situs (*site*) yang terkait dengan tema penelitian ini.

5. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisa dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan penalaran *deduktif* dan *induktif*.⁴⁵ Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus. Sementara Induktif adalah penalaran data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk membahas pokok permasalahan dalam skripsi ini, penyusun memaparkan pembahasan skripsi ini dalam lima bab, dengan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab.

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan skripsi. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tinjauan umum tentang pola relasi Islam dan Negara dalam pemikiran politik Islam yang meliputi relasi agama dan negara serta relasi Islam dan negara dalam pemikiran politik Islam.

47 Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

Bab *ketiga*, membahas tentang biografi Benazir Bhutto yang meliputi latar belakang dan perjalanan hidup, karier dan karya-karyanya, karakteristik pemikirannya, serta tentang relasi Islam dan Negara menurut Benazir Bhutto.

Bab *keempat*, membahas tentang analisis pemikiran Benazir Bhutto yang meliputi, Catatan atas pemikiran Benazir Bhutto, kontribusi pemikiran Benazir Bhutto bagi Pakistan, serta relevansi pemikiran Benazir Bhutto di Indonesia.

Bab *kelima* merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang penyusun dapatkan dari hasil menganalisis pemikiran Benazir Bhutto.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menelaah secara panjang lebar melalui kajian literatur (*library*) pada penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari pemikiran Benazir Bhutto di Pakistan, sebagai bagian dari pandangannya tentang relasi Islam dan negara. Secara lebih rigid, gagasan tersebut dapat dirumuskan berikut ini:

1. Islam merupakan agama yang cinta damai, namun Pakistan yang sejak kemerdekaannya memproklamiskan sebagai negara Islam, justru tidak pernah sepi dari kekerasan politik dan politik kekerasan. Kemelut politik Pakistan yang tak berkesudahan inilah yang kemudian menggugah politisi dan pemikir perempuan Pakistan, yakni Benazir Bhutto untuk berkiprak di dunia politik. Latar belakang keluarga yang sejak kecil melibatkannya dalam kehidupan politik, kemudian dididik menjadi muslim demokratis dan toleran, belajar dalam pendidikan ala Barat, menjadi sosialisasi politik baginya untuk kemudian menerapkan pemikiran yang unik, yang mendasarkan pertimbangannya pada aspek substantif pemaknaan Islam di Pakistan sebagai negara Islam.
2. Dengan pemikirannya yang cenderung substantivistik dan tergolong bertentangan dengan mayoritas muslim Pakistan (tradisionalis dan fundamentalis) ini, Benazir memiliki kontribusi dalam ranah politik Pakistan. Kontribusi terbesar Benazir, selain keseriusannya terhadap

wacana Islam adalah membawa perubahan politik di Pakistan. Ia memulihkan hak-hak kaum sipil yang sebelumnya dibungkam di bawah rezim militer. Selain itu, Benazir juga berupaya menyelamatkan masyarakat Pakistan dari pengkotak-kotakan dan etnisitas, termasuk diskriminasi antar jenis kelamin. Kehadiran Benazir dalam panggung politik Pakistan, juga menjadi simbol lahirnya gelombang demokratisasi di negara Islam, dalam konteks ini Benazir mengajukan tesis tentang masalah-masalah yang bisa menjadi bahan dan strategi rekonsiliasi untuk dunia Islam dengan gagasan modern yang menyangkut lingkungan politik, ekonomi, sosial yang modern. Karena itu, kontribusi Benazir tidak hanya bicara tentang Islam dengan kaca mata yang kritis, tetapi juga menuntut dunia Barat menghapuskan stigma negatif tentang Islam sekaligus mengagendakan upaya menghentikan gelombang radikalisme Islam serta menemukan kembali nilai-nilai toleransi dan keadilan yang ada dalam Islam.

3. Dalam konteks Indonesia, dengan pandangannya ini, Benazir sebenarnya ingin mengatakan bahwa gagasannya selaras dengan eksistensi, artikulasi, dan manifestasi nilai-nilai Islam yang intrinsik dalam iklim politik kebangsaan lebih penting untuk dilakukan, sekaligus amat kondusif bagi upaya pengembangan nilai Islam dalam sosok kulturalisasi masyarakat dan dunia Islam modern. Sedangkan dari pemahaman yang lebih umum, gagasan Benazir ini adalah counter wacana terhadap pemikiran yang mengidealkan bahwa Islam harus

menjadi dasar negara. Pemikiran Benazir ini selaras dengan paradigma Islam yang melihat bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara atau sistem praktik yang harus diselenggarakan oleh umatnya, ataupun istilah-istilah teknis politik lainnya, kecuali nilai-nilai dan prinsip-prinsip etis tentang demokrasi, keadilan, egalitarianisme, persaudaraan, dan kebebasan yang justru bersifat universal, yang akhirnya sepanjang suatu negara tetap berpegang dan menyelenggarakan prinsip-prinsip universal itu, maka baik sistem maupun mekanisme yang dijalankan adalah benar menurut Islam.

B. Saran-Saran

Penyusun menyadari bahwa akhir dari penelitian ini tidaklah sesempurna yang penyusun bayangkan dari awal, sebab kendala seperti kelemahan penyusun dalam memahami bahasa Urdu-Inggris, sebagai bahasa nasional Pakistan dan keseharian Benazir, sehingga membutuhkan proses penerjemahan yang lama. Disamping untuk mengkaji politik Pakistan Kontemporer akan lebih menarik kalau dilakukan penelitian lapangan (*field research*). Mengingat beberapa pertimbangan tersebut diatas kiranya perlu untuk memperhatikan beberapa hal sebagai saran dari penyusun :

1. Penelitian mengenai politik Pakistan kontemporer yang mengkaji dinamika perpolitikan Pakistan dengan membatasi pada salah satu tokoh politik (Benazir Bhutto) dengan menggunakan studi kepustakaan kelihatannya tidaklah sebaik penelitian lapangan, oleh karenanya

penyusun berharap ada penelitian lainnya melanjutkan penelitian ini dengan menempuh jalur penelitian lapangan.

2. Pakistan sebagai objek penelitian tampaknya akan tetap menarik untuk dijadikan sebagai laboratorium penelitian, selain karena warisan sejarah keislaman, keunikan Pakistan sebagai negara Islam dengan beragam etnis, maka perlu untuk para *stake holder* (pemerintah maupun para peneliti tanah air) untuk memperhatikan kemungkinan menekuni studi kawasan, khususnya Pakistan. Hal ini penting disamping untuk sumbangan pengetahuan dengan spirit keingin-tahuan yang tinggi, juga sebagai langkah untuk memahami karakteristik negara tersebut untuk ditindaklanjuti dalam kerangka kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007.

Fiqh/ Usul Fiqh

Adnan Amal, Taufik, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1989.

Amiruddin, M.Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Esposito, John L., *Islam dan Perubahan Sosial Politik di Negara Sedang Berkembang*, terj. Wardah Hafidz, Yogyakarta: PLP2M, 1985.

_____, *Islam dan Politik*, terj. H.H. Joesoef Soe'ayb, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hidayat, Komaruddin (ed.), *Islam, Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet ke-5, Jakarta: UI Press, 1993.

Misrawi, Zuhairi, *Al-Quran Kitab Toleransi; Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*, Jakarta: Penerbit Fitrah, 2007.

Lain-lain

Adiguna, *Pemikiran Politik Sayid Abul A'la Maududi dan Kontribusinya Bagi Pakistan (1941-1979)*, skripsi S1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Affendi, Abdelwahab el-, *Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Politik Islam*, terj. Amiruddin Ar-Rani, cet ke-2, Yogyakarta: LKiS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2001.

Ali, A Mukti, *Alam Pikiran Modern di India dan Pakistan*, cet ke-3, Bandung: Penerbit Mizan, 1996.

- Ali, Fachri dan Efendi, Bachtiar, *Merambah Jalan Baru Islam Indonesia Masa Orde Baru*, cet ke-2, Bandung: Penerbit Mizan, 1990.
- Ali, K, *History of India, Pakistan, and Bangladesh*, Dhaka: Ali Publications, 1980.
- Ali, Tariq, *Benturan Antar Fundamentalis, Jihad Melawan Imperialisme Amerika*, terj. Hodri Arie, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Ali, Zaenal, *Tragedi Benazir Bhutto*, Yogyakarta: Narasi, 2008.
- Arivia, Gadis, "Benazir Bhutto: Melawan Fundamentalisme dan Kediktatoran," <http://indonesianmuslim.com/benazir-bhutto-melawan-fundamentalisme-dan-kediktatoran.html>, akses tanggal 8 Agustus 2009.
- Aryani, Aini, "Kontribusi Wanita Pakistan Untuk Bangsanya," <http://warnaislam.com/ragam/pakistan/2008/11/15/19200.htm>, akses tanggal 28 Juni 2009.
- Asiah, Nur, *Kebijakan Politik Ayub Khan di Pakistan (1958-1969)*, skripsi S1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Azra, Azyumardi, *Historiografi Islam Kontemporer, Wacana, Aktualitas dan Aktor Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- _____, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, Yayasan Paramadina, 1996.
- Bhutto, Benazir, *Rekonsiliasi, Islam, Demokrasi dan Barat*, terj. Annisa Rahmalia, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2008.
- _____, *Daughter of Destiny*, New York: Simon and Schuster, 1989.
- Black, Antony, *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Doherty Katherine M, dan Doherty, Craig A, *Benazir Bhutto*, pdf-search-engine, 1996.
- C. Adams, Charles, *Islam and Modernism in Egypt*, London: Oxford University Press, 1933).
- Esposito, John L. dan Voll, John O, *Demokrasi di Negara-negara Muslim*, Bandung: Penerbit Mizan, 1999.

- Fadlan, Nur, "Dibalik Ideologi Pakistan Saat Ini," www.alislam.com, akses tanggal 7 Juli 2009.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Kurzman, Charles (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul ulum dan Heri Junaidi, Jakarta: Yayasan Paramadina, 2001.
- Kusumawati, Astuti, *Pakistan pada Masa Pemerintahan Zulfikar Ali Bhutto (1971-1977)*, skripsi S1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam, Cita-cita dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985).
- Madjid, Nurcholish, *Tidak Ada Negara Islam, Surat Menyurat Nurcholish-Roem*, dalam *Islamika* No.1 Juli-September 1993
- _____, *Agama dan Negara dalam Islam Telaah atas Fiqh Siyasy Sunni*, dalam Budhy Munawar Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, cet II, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.
- Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Marfu'ah, Siti, *Islamisasi Pakistan pada Masa Zia ul-Haq (1977-1988)*, skripsi S1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Mashad, Dhurorudin, *Benazir Bhutto: Profil Politisi Wanita di Dunia Islam*, Jakarta: Cidesindo, 1996.
- _____, "Pemilu di Pakistan 1990; Kegagalan Benazir Bhutto dalam Meraih Kekuasaan," *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 13, Jakarta, 1993.
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Misrawi, Zuhairi, "Rekonstruksi Toleransi; Dari Toleransi sebagai Modus Vivendi menuju Value," *Jurnal Dialog Peradaban*, Vol. I, No.1, Jakarta, Juli-Desember 2008.
- Muzakki, Akhmad, "Teologi Politik: Konsep Negara Dalam Al-Qur'an," <http://ppssnh.tripod.com>, akses tanggal 15 Oktober 2009.

- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, cet ke-9, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- _____, dan Azra, Azyumardi, *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Noor, Firman, "Bhutto, Sosialisme, dan Islam," www.republika.com, edisi 2 Januari 2008, akses tanggal 2 Agustus 2009.
- Rachman, Budhy Munawar, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, cet II Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.
- Saidah, Nur, *Proses Berdirinya Negara Islam Pakistan 1937-1947*, skripsi S1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Santoso Az, Lukman, "Pergumulan Islam dan Demokrasi di Pakistan," Kompas Cetak, edisi 14 Agustus 2009.
- Sarantakos, Satirios, *Social Research*, Melbourne: Mac Millan Education Australia Pty Ltd, 1993.
- Sihbudi, Riza, *Menyandera Timur Tengah, Ketidakbijakan AS dan Israel Atas Negara-negara Muslim*, Bandung: Penerbit Mizan, 2007.
- Symonds, Richard, *Pembinaan Pakistan*, terj. Sjafi'i R. Batuah, Jakarta: Balai Pustaka, 1951.
- Syamsudin, M. Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Vaezi, Ahmed, *Agama Politik, Nalar Politik Islam*, terj. Ali Syahab, Jakarta: Citra, 2006.
- Wafiyah, Ana, *Peranan Jama'at I Islami dalam Mewujudkan Negara Islam Pakistan (1948-1973)*, skripsi S1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Wahid, Abdurrahman, "In Memoriam Benazir Bhutto," <http://www.jawabali.com>, akses tanggal 2 Juli 2009.
- Wahid, Marzuki dan Rumaidi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Zakaria, Rafiq, *The Trial of Benazir*, Bombay: Popular Prakashan, 1989.

“Benazir Bhutto,” <http://www.wikipedia.org/wiki/benazirbhutto.htm>, akses tanggal 2 Juli 2009.

“Benazir Bhutto, Martir Demokrasi Pakistan,” <http://www.tokohindonesia.com/aneka/tokohdunia/benazirbhutto/index.shtml>, akses tanggal 5 Juni 2009.

“Benazir Bhutto, biografi Singkat,” http://kelompokdiskusi.multiply.com/journal/item/1065/Benazir_Bhutto_biografi_singkat, akses tanggal 27 Juli 2009.

“Liaquat Ali Khan become Prime Minister 1947-1951,” <http://www.storyofpakistan.com/articletext.asp?artid=A134>, akses tanggal 8 Januari 2009.

“Partai Rakyat Pakistan,” http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Rakyat_Pakistan.htm, akses tanggal 3 Juli 2009.

“Pakistan”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pakistan>, akses tanggal 5 Januari 2009

“Pinkie yang tak ada duanya,” Majalah Tempo, edisi November 1988.

“Sekilas Perjalanan Politik Bhutto,” <http://www.kcm.com>, akses tanggal 2 Juni 2009.

Suara Pembaruan, edisi 5 Desember 1988.

Harian Merdeka, edisi 18 Agustus 1988.

Bali Post, edisi, 18 November 1988.

Harian Kompas, edisi 7 Agustus 1990.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
			BAB III
1	83	130	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
2	85	133	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
3	85	134	Harta rampasan <i>fai'</i> yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH-ULAMA

Abdurrahman Wahid

Lahir 4 Agustus 1940 di Jombang Jawa Timur, ia tumbuh dan dibesarkan di di kalangan keluarga santri. Pendidikan dasarnya diselesaikan di Sekolah Rakyat pada tahun 1953. pada tahun 1964 ia berangkat ke Kairo untuk belajar di Universitas al-Azhar. Di samping sebagai ketua kelompok kerja (pokja) Forum Demokrasi, ia juga pernah menduduki posisi penting di lembaga Internasional seperti WCRP. Di samping sebagai ketua PBNU pada Muktamar ke 27 di Situbondo pada tahun 1984, dia juga terpilih menjadi presiden RI pada pemilu 1999. karya-karyanya antara lain; *Bunga Rampai Pesantren, Muslim di Tengah Pergumulan, Tabayun Gus Dur, Islamku, Islam anda, Islam Kita* (2006), *Islam Kosmopolitan* (2008) dan lain-lain.

Ahmad Syafi'i Ma'arif

Ahmad Syafii Maarif lahir pada tanggal 1935 di Sumpurkudus, Sumatra Barat. Pernah belajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Lintau (1953) dan Yogyakarta (1956), FKIP Universitas Cokroaminoto Surakarta sampai Sarjana Muda (1964), tamat FKIS IKIP Yogyakarta (1968), belajar sejarah pada Northern Illinois University (1973) dan memperoleh gelar MA dalam bidang sejarah pada Ohio University, Athens Amerika Serikat (1980) dan mendapat gelar Ph.D dalam bidang Pemikiran Islam diperolehnya dari The University of Chicago, Amerika Serikat Desember 1982. ia mengajar di beberapa perguruan tinggi; FSIPS IKIP Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIL. Dan sejak tahun 1999 menjadi ketua umum PP Muhammadiyah setelah menjadi ketua umum PP Muhammadiyah pada periode khidmat sebelumnya.

Dhuroruddin Mashad

Lahir di Bojonegoro, 7 Juni 1966. alumnus FISIP, UI, jurusan Ilmu Politik (perbandingan Politik) tahun 1991. staf peneliti Kajian Asia Selatan pada puslitbang Politik dan kewilayahan LIPI, Jakarta. Aktifitasnya selain menulis di media massa dan jurnal, juga menjadi pengajar mata kuliah sisitem politik di Asia selatan di FISIF, UI. Beberapa karyanya, *Benazir Bhutto; Profil Politisi Wanita di dunia islam, 1996. Menggugat Penguasa, 1999. Korupsi politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde Baru, 1999. Andai Aku Jadi Presiden, 2004. akar Konflik Politik Islam di Indonesia, 2008*, dan lain-lain.

Fazlur Rahman

Lahir pada tahun 1919 M di Indo-Pakistan. Rahman dibesarkan dalam keluarga yang memiliki tradisi madzhab Hanafi yang lebih terkenal dengan rasionalitasnya. Sekolah dasar dan menengah dilaluinya di kotakelahirannya. Pada tahun 1942 ia berhasil mendapatkan gelar MA dalam bidang Sastra Arab dari Universitas Punjab. Pada tahun 1950, ia berhasil meraih gelar Doktor dari Universitas Oxford Inggris dengan disertasi tentang tentang Ibnu Sina. Setelah

menyelesaikan studinya, Rahman lebih memilih untuk tetap tinggal di Inggris seraya mengajar di berbagai Perguruan Tinggi seperti Durham University, Inggris dan Institute of Islamic Studies, McGill, Kanada.

Pada tahun 1962 Rahman kembali ke Pakistan, dan banyak mengemban jabatan di negeri asalnya ini. Namun ketika lingkungannya dirasa tidak cocok untuk pengembangan intelektualnya, ia memilih pergi ke Chicago Amerika Serikat pada tahun 1969. kemudian ia menjadi guru besar Kajian Islam di Departement of Near Eastern Languages and Civilization. Rahman banyak membuat karya intelektual, diantaranya adalah: *Islam and Modernity*; *Transformation of Intellectual Tradition*; *Islamic Methodology in History*; *Major of The Qur'an*; dan lain-lain.

M. Din Syamsudin

M. Din Syamsudin adalah Guru Besar Pemikiran Politik Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lahir di Sumbawa Besar 31 Agustus 1958. setelah nyantri di Gontor sampai tahun 1975, ia melanjutkan studi di IAIN Jakarta sampai tahun 1982. lalu meraih gelar Master (1988) dan doctor (1991) dari University of California Los Angeles (UCLA). Selain sebagai seorang akademisi, ia juga aktif di berbagai organisasi seperti Muhammadiyah, ICMI, MUI dan sempat menjadi aktifis Golkar, bahkan pernah juga menjadi birokrat pada tahun 1998-2000. terakhir ia menjabat sebagai sekretaris Umum MUI pusat dan menjadi salah seorang pengurus Muhammadiyah.

Munawir Syadzali

Munawir Syadzali lahir di Klaten, 7 November 1925. ia adalah seorang intelektual sekaligus birokrat. Banyak jabatan birokrasi yang pernah disandangnya, terakhir sebagai Menteri Agama Kabinet Pembangunan dari tahun 1983-1993. Pendidikan dasar hingga menengahnya ia peroleh di kota Solo. Setelah itu ia melanjutkan studinya di University of Exter, Inggris (1953-1954); Georgetown University, Washington DC. AS. Serta memperoleh gelar MA dengan tesis *Indonesias Muslim Parties and Their Political Concept* pada tahun 1959. dan terakhir tercatat sebagai pengajar Pasca Sarjana pada IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Buku Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, karyanya banyak di baca dan dirujuk oleh Peminat Pemikiran Politik Islam.

Nurcholish Madjid

Dia dilahirkan di Jombang, 17 Maret 1939 (26 Muharam 1358) dibesarkan dalam keluarga Pesantren, dengan pendidikan yang ditempuhnya: sekolah rakyat di Mojoanyar dan bareng serta Madrasah Ibtidaiyyah di Mojoanyar, pesantren Darul Ulum Rejoso, Jombang; KMI (Kulliyatul Muallimin al-Islamiyah) pesantren Darusalam di Gontor, Ponorogo, IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta dan Universitas Chicago, AS. Aktif dalam gerakan kemahasiswaan ketua PB HMI, 1966-1969 dan 19697; Presiden pertama PERMIAT (Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara), 1967-1969, wakil IIFSO (International Islamic of Student Organization), 1969-1971. Mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dosen pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, peneliti di LIPI, guru

besar tamu pada Universitas McGill, Montreal, Canada. Dan sejak tahun 1986 mendirikan dan menjadi Rektor Yayasan Wakaf Paramadinah.

Muhammad Iqbal

Lahir lahir di Sialkot, Punjab, India, pada 9 November 1877 dan meninggal di Lahore, 21 April 1938 pada umur 60 tahun. Menganut aliran/tradisi Sufisme, Syi'ah, Ismailiyah. Gagasan penting yang dilahirkan adalah Teori Dua-Negara. Pemikirannya dipengaruhi Aristoteles, Rumi, Goethe dan Nietzsche. Pemikirannya mempengaruhi Gerakan kemerdekaan Pakistan, Ali Syari'ati, Khalilullah Khalili, dan Jawdat Said. Iqbal berasal dari keluarga Brahma Kashmir, tetapi nenek moyang Muhammad Iqbal telah memeluk islam 200 tahun sebelum Ia dilahirkan. Ayah muhammad Iqbal, Nur Muhammad adalah penganut Islam yang taat dan cenderung ke pada ilmu tasawuf.

Ia masuk sekolah dasar dan menengah di Sialkot. Muhammad Iqbal juga seorang sastrawan besar Islam. Diantara karya puisinya yang dianggap besar pernah diterbitkan ialah *Asrari Khudi* (Rahsia agung-Rahsia Peribadi), terbit pada tahun 1915, diikuti dengan *Rumuz bi Khudi* (Rahsia tidak Mementingkan Diri Sendiri), pada tahun 1917, *Fayami Mashriq* (Pesan Untuk Timur), *Tulu'ul Islam* (Munculnya Islam) dan banyak lagi pada tahun-tahun berikutnya, bukunya yang dianggap penting ialah *Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Membina Kembali Cita-Cita Keagamaan Dalam Islam) dan sebuah lagi yang tidak dapat disiapkannya kerana sakit tua yang dideritanya ialah *The Reconstruction of Muslim Jurisprudence*. Kebanyakan sajak-sajaknya ditulisnya dalam bahasa Parsi dan Urdu.

Zuhairi Misrawi

Lahir di lahir di Sumenep, Madura, 5 Februari 1977. selain sebagai intelektual muda NU (Islam), Ia juga Direktur Moderate Muslim Society (MMS) dan Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia. Ia juga Pernah nyantri di Pondok Pesantren TMI al-Amien, Prenduan, Sumenep, Madura (1995). Menamatkan S1 di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo-Mesir (2000). Selama di Kairo pernah menjadi redaktur buletin mahasiswa TEROBOSAN, pemimpin redaksi INFORMATIKA dan Jurnal OASE. Pernah kuliah S2 di Program Studi Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Aktivitas sehari-hari sebagai Koordinator Program Islam Emansipatoris, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, pemimpin redaksi Jurnal PERSPEKTIF PROGRESIF.

Pernah menjadi Koordinator Kajian dan Penelitian LAKPESDAM NU, dan kini menjadi redaktur Jurnal Tashwirul Afkar, LAKPESDAM NU. Menjadi kontributor tulisan di sejumlah buku, antara lain: *Islam Pribumi*; *Mendialogkan Agama dan Membaca Realitas* (Airlangga, 2003), *Begawan Jadi Capres* (KKP Paramadina, 2002), *Syariat Islam Yes, Syariat Islam No* (Paramadina, 2002), *Doktrin Islam Progresif* (LSIP, 2004), *Islam Melawan Terorisme* (LSIP, 2004). Selain itu menulis artikel di sejumlah jurnal ilmiah, antara lain: *Jurnal Tashwirul Afkar*, *Jurnal Millah*, *Jurnal Postra*, *Jurnal OASE* dan *Jurnal Justisia*.

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Lukman Santoso
Tempat tanggal lahir : Sekincau, 20 Mei 1986
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Alamat asal : Ds. Giham Sukamaju Rt.02. Rw. 05 Kec. Sekincau
 Kab. Lampung Barat 34785
Alamat Sekarang : Minggiran MJ II/1477 Rt. 56 Rw. 15. Kelurahan
 Suryodiningkratan. Yogyakarta
 Phone : 085643210185
 E- mail : cak_luk2005@yahoo.co.id
 Tinggi / Berat Badan : 170 cm / 57 Kg
Nama Orang Tua :
 a. Ayah : Jumali Ar
 b. Ibu : Hindun Marfu'ah
 Alamat Orang Tua : Ds. Giham Sukamaju, RT 02, RW. 05 Kecamatan
 Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Lampung

PENGALAMAN PENDIDIKAN FORMAL

TK Pertiwi, Lampung Tengah	1992 - 1993
MI Miftahul Mubtadi'in. BWI, Jawa Timur	1993 - 1999
MTs Nurul Iman, Sekincau	1999 - 2002
MA Miftahul Ulum, Lampung Timur	2002 - 2005
S 1 Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta	2005 - sekarang

PENGALAMAN PENDIDIKAN NON-FORMAL

- PP Subulunnajah Lampung Timur 2002 – 2005
- PPM Hasyim Asy'ari Yogyakarta 2005 – 2008

PENGALAMAN ORGANISASI**2001 - 2006**

- Ø Ketua OSIS MTs Nurul Iman, Sekincau.
- Ø Peserta Jambore Nasional di Jawa Tengah (2001)
- Ø Peserta Raimuna Nasional di Yogyakarta (2003)
- Ø Ketua DKR Braja Sebah, Lampung Timur
- Ø Ketua OSIS MA Miftahul Ulum Lampung Timur (2004)
- Ø Ketua Divisi Pengkaderan KWARCAB Lampung Timur
- Ø Sekretaris Umum PP Subulunnajah Lampung Timur (2005)
- Ø Sekretaris Tanfidiyah PPM Hasyim Asy'ari Yogyakarta (2006).

2007

- Ø Divisi Penerbitan BEM-J JS Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Ø Sekretaris Redaksi LPM Advokasia Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta
- Ø Koordinator Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH).
- Ø Koordinator Panitia Training Jurnalistik Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta

2008

- Ø Staring Comitte (SC) Pelatihan Kepenulisan media Massa Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta
- Ø Direktur Lembaga Studi Agama dan Negara (LESAN) UIN Yogyakarta
- Ø Dewan Pengarah Pusan Studi Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syariah UIN Yogyakarta
- Ø Redaktur Jurnal LeSAN Fakultas Syariah UIN Yogyakarta

2009

- Ø Pimpinan Redaksi LPM Advokasia Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ø Sekretaris Yayasan Hasyim Asy'ari Yogyakarta.

PENGALAMAN

- Staf Penerbit Navila Yogyakarta (2006)
- Staf Penerbit Kutub Yogyakarta (2007)
- Trainer Sekolah Jurnalistik LKKY (2007)
- Tim Penulis Kronik Kebangkitan Indonesia, Indonesia Buku Jakarta (2008).
- Sekretaris Tim Training Penerbitan Buku dan Jurnalistik Depnakertrans Yogyakarta (2008)
- Motivator Pendidikan Pemilu Election-MDP Cepdes Wilayah DIY (2009)

Hobby : Membaca, Menulis, Nonton film, Memancing

Cita-cita : Usahawan-politisi.

Motto Hidup : Selalu Optimis Meraih Cita-cita.

KARYA

- Jagalah Lisanmu (Pustaka Insan Madani, 2008)
- Kebangkitan Indonesia (Indonesia Buku, 2008)
- Menuju Indonesia Masa Depan (LeSAN, 2008)
- Bercermin pada Toyota, Yamaha, dan Honda (Expresi, 2009)

PRESTASI

- Pemenang Syari'ah Award 2008 kategori mahasiswa berprestasi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Juara I Lomba Resensi se- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007
- Juara III Lomba Resensi Nasional Penerbit Erlangga 2007.
- Juara I Lomba Resensi Nasional Novel Islami Penerbit Gramedia 2008.

ttd

Lukman Santoso